

DAMPAK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP *MULTIPLIER EFFECT* EKONOMI PEDESAAN DI DAERAH RIAU¹

*Development Impact of Palm Oil Plantation Toward
Rural Economic Multiplier Effect in Riau Province*

Almasdi Syahza²

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru

Email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

Abstrak

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap usahatani kelapa sawit. Ini terbukti semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara swadaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui multiplier effect yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kegiatan perkebunan kelapa sawit menciptakan *multiplier effect* sebesar 2,48 dan meningkatkan indek pertumbuhan kesejahteraan petani pada tahun 2003 sebesar 1,74 persen.

Kata kunci: multiplier efek, ekonomi pedesaan, kelapa sawit

Abstract

Palm oil has a big role in increasing economic of people, especially for farmers; therefore it is recognized as an important and strategic commodity around Riau Province. For the next future, large area of palm oil plantation will continue increase since people pay attention towards palm oil industry. It can be proven from the progressively expand individually of palm oil plantation. Aim of this research is to understand the multiplier effect experienced from palm oil plantation and its impact toward the level of prosperity in the rural society. Research result concludes that palm oil plantation creates multiplier effect at the sum of 2.48 and improve growth index of prosperity of the farmers in the year 2003: 1.74 per cent.

Keywords: multiplier effect, rural economic, oil palm.

Pendahuluan

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dengan industri. Untuk mencapai ini diperlukan kekuatan dan

¹ Telah dipublikasikan dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

² Staf pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru; email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net.

kemampuan sektor pertanian guna menunjang pertumbuhan di sektor industri yang kuat dan maju.

Pembangunan perekonomian daerah Riau dilandasi oleh dua pola umum pembangunan yaitu pola umum jangka panjang dan pola umum jangka pendek (Pelita). Pola umum jangka panjang memuat landasan pembangunan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diarahkan kepada dua sektor kunci yaitu sektor pertanian dan sektor industri dengan memperhatikan keterkaitan dengan sektor lain. Secara spesifik arah kebijaksanaan pembangunan daerah Riau masih menitik beratkan pada sektor kunci. Arah pembangunan tersebut adalah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusi dalam pembentukan PDRB Propinsi Riau.

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan, namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil (Pemda Propinsi Riau, 2000).

Setiap pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu kepada lima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) usaha pertambangan; 6) sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah (Syahza, 2003a).

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR), program kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas. Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Riau adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa. Untuk sektor perkebunan Pemerintah Daerah Riau menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah.

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan

dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza, 2002).

Karena alasan di atas maka kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepatnya di daerah Riau. Ini disebabkan saat krisis ekonomi dimulai pada pertengahan tahun 1997, sektor perkebunan merupakan penyelamat bagi petani perkebunan khususnya petani kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi (Saragih, 2001). Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; *pertama*, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan *kedua*, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas mencapai 1.312.661 ha pada akhir tahun 2002, maka pada saat ini daerah Riau mempunyai kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2003). Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS).

Dari potensi yang ada, pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Syahza, 2003b). Dengan demikian kelapa sawit diharapkan menjadi sektor basis ekonomi pedesaan di daerah Riau.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka yang menjadi isu pokok pada penelitian ini adalah peran perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian di pedesaan. Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi yang besar di daerah pedesaan? Apakah perkebunan

kelapa sawit di daerah Riau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan?

Berdasarkan gambaran dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya *multiplier effect* yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode *Case Study and Field Research* (penelitian kasus dan penelitian lapangan). Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di daerah Riau dengan pemilihan lokasi secara *Multistages cluster sampling* di wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit. Daerah terpilih adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Alasan pemilihan kedua kabupaten tersebut, antara lain: 1) dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi Riau, daerah tersebut merupakan bahagian dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit; 2) umur kelapa sawit pada kedua daerah tersebut pada usia produksi optimum yaitu umur 10 sampai 16 tahun (baik produksi TBS, minyak sawit, dan inti sawit); 3) di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit ketiga kabupaten tersebut banyak masyarakat tempatan melakukan usahatani kelapa sawit secara swadaya; dan 5) dari ketiga kabupaten tersebut mempunyai produktivitas kebun yang berbeda.

Sampel diambil dari masyarakat di daerah penelitian yang terpilih. Rumus untuk ukuran sampel adalah (Cochran, 1991):

$$n = \frac{\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2}}{1 + \frac{1}{N} \left[\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} - 1 \right]}$$

Keterangan: n adalah ukuran sampel; P merupakan proporsi dari masing-masing kelompok sampel (plasma dan swadaya) pada kelas yang terpilih; sedangkan Q = 1 - P. N adalah ukuran populasi; Z adalah nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan, dan d = standar error. Penelitian ini menggunakan batas probabilitas keyakinan sebesar 95 persen.

Pada masing-masing cluster yang terpilih, diambil dua macam responden, yaitu responden dari peserta plasma kelapa sawit (BUMN atau perusahaan swasta) dan responden dari daerah sekitarnya (masyarakat tempatan) yang melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit (swadaya murni).

Dari masing-masing daerah terpilih sebagai sampel, ditentukan proporsi (P) dari masing-masing kelompok sampel yaitu petani plasma dan petani swadaya. Tingkat keyakinan penelitian ini adalah 95 % ($\alpha = 5\%$), dan diasumsikan datanya berdistribusi normal, sehingga diperoleh nilai z sebesar 1,96. Dengan menggunakan rumus Cochran, maka ukuran sampelnya sebesar 380 responden (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Petani Kelapa Sawit dan Ukuran Sampel pada Masing-masing Daerah Terpilih

Kabupaten	Luas (ha)	Produksi (Ton)	Petani Kelapa Sawit (KK)			
			Plasma	Swadaya	Jumlah	
Kampar	212.771	506.048	33.156	13.050	46.206	
Rokan Hulu	294.539	400.527	9.335	32.559	41.894	
Pelalawan	162.500	471.770	15.972	3.039	19.011	
Jumlah			58.463	48.684	107.111	
Ukuran Sampel di Masing-masing daerah terpilih						
P	Q	d	Z	n	Ukuran Sampel	
					Plasma	Swadaya
54,6%	45,4%	5%	1,96	380	271	109
Kabupaten Kampar				183	154	29
Kabupaten Rokan Hulu				115	43	72
Kabupaten Pelalawan				82	74	8

Sumber: Hasil olahan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Pendekatan penciptaan *multiplier effect* pada kegiatan perkebunan kelapa sawit digunakan formula sebagai berikut (Tiebout dalam Tambunan, 2001).

$$K = \frac{1}{1 - (MPC \times PSY)}$$

Keterangan: K adalah pengaruh ekonomi wilayah (*multiplier effect*); MPC merupakan proporsi pendapatan petani yang dibelanjakan di daerah tersebut; dan PSY adalah bagian dari pengeluaran petani yang menghasilkan pendapatan di daerah tersebut atau persen kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi oleh wilayah setempat. Semakin tinggi angka *multiplier effect* kegiatan perkebunan kelapa sawit (K) maka semakin tinggi pula perputaran uang di daerah pedesaan.

Guna mengetahui tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut (Todaro, 2000):

$$G = w_1 g_1 + w_2 g_2 + \dots + w_i g_i$$

G adalah indek pertumbuhan kesejahteraan sosial; **g_i** adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke i; dan **w_i** merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indeks pertumbuhan kesejahteraan (G) dari periode ke periode.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Multiplier Effect

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Selain besaran jumlah pendapatan pada masing-masing rumah tangga petani kelapa sawit, hal yang perlu dicermati dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan.

Walaupun tidak semua kegiatan perkebunan memberikan atau menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tergantung kepada jenis investasi perkebunan (inti atau plasma) dan sektor ekonomi yang akan dilakukan. Investasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh kepada sejauh mana manfaat kegiatan perkebunan memberi tetesan pada masyarakat sekitarnya. Kebijakan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan perkebunan sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sampel mengungkapkan sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet).

Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha. Dari seluruh sampel yang diamati, rata-rata pendapatannya sebesar Rp 2.040.622 per bulan, 12,36 persen bersumber dari pendapatan di luar perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Dari sisi kebutuhan rumah tangga rata-rata pengeluaran petani setiap bulannya sebesar Rp 1.183.288. Persentase masing-masing jenis pengeluaran rutin petani kelapa sawit di pedesaan disajikan pada Tabel 2. Pengeluaran terbesar adalah kebutuhan hidup keluarga (kebutuhan dapur).

Tabel 2 Rataan Jenis Pengeluaran Rutin Petani Kelapa Sawit Per Bulan

Jenis Pengeluaran	Plasma		Swadaya	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1 Dapur (harian)	629.206	53,00	592.857	50,62
2 Listrik	74.918	6,31	64.471	5,51
3 Telepon	19.556	1,65	29.286	2,50
4 Transportasi	90.234	7,60	95.161	8,13
5 Kesehatan	5.397	0,45	6.143	0,52
6 Rekreasi	15.935	1,34	18.500	1,58
7 Pendidikan	287.897	24,25	297.786	25,43
8 Asuransi kebun	28.794	2,43	22.686	1,94
9 Sosial	35.336	2,98	44.214	3,78
Jumlah	1.187.273	100,00	1.171.104	100,00

Komponen pengeluaran untuk kebutuhan hidup petani adalah sembilan kebutuhan pokok. Transportasi berupa biaya operasional kendaraan pribadi dan ongkos angkutan umum. Komponen pengeluaran rekreasi, antara lain ke kota mengunjungi keluarga, anak, dan jalan-jalan. Untuk komponen pendidikan termasuk besar, karena kesadaran bagi petani untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Semua bentuk pengeluaran oleh petani apakah pengeluaran rutin atau pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan kebun, pada umumnya dapat diperoleh di daerah, antara lain; pasar kecamatan, pasar desa, kedai-kedai, koperasi petani, atau pada pedagang keliling. Khusus untuk kebutuhan sarana produksi pada umumnya memakai alat hasil produksi daerah pedesaan (industri

rumah tangga) seperti, angkong (gerobak), dodos, parang, engrek, tojok, dan cangkul. Sedangkan untuk jenis sprayer kebanyakan dibeli di pasar kabupaten.

Apabila dikaji dari struktur biaya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Hal kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan (Basri, 2003).

Dengan menggunakan rumus angka pengganda diperoleh nilai MPC = 0,8415 dan nilai PSY = 0,7079. Sehingga diperoleh angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248,00 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa.

Nilai-nilai tersebut diperoleh dengan dasar dan asumsi sebagai berikut:

- 1) Persentase pendapatan petani sawit dibelanjakan di wilayah setempat (MPC) sekitar 84,15 %.
- 2) Kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi di wilayah setempat (PSY) sebesar 70,97 %, antara lain:
 - Kebutuhan peralatan pertanian ringan yang digunakan dalam kelola teknis diproyeksikan mampu dipenuhi oleh wilayah setempat.
 - Pengadaan sarana prasarana penunjang yang disediakan oleh perusahaan perkebunan dan koperasi dapat dipenuhi oleh wilayah setempat.

Seperti yang diungkapkan Wijaya (2002), manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesaan bisa tumbuh karena koperasi berakat kuat di pedesaan.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan

mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan).

Dari segi penanaman investasi yang dilaksanakan, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan karena investasi pada beberapa daerah kabupaten/kota mempunyai multiplier efek yang kecil kecuali untuk daerah Batam dan Pekanbaru (Syahza, 2003b).

Ada empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. *Pertama*, investasi sektor industri di daerah kabupaten/kota yang menyebabkan disparitas spasial semakin membesar disebabkan oleh industri milik swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta lebih mengutamakan target keuntungan, sementara investasi pemerintah lebih mengutamakan nilai manfaat untuk masyarakat. Dalam penelitian ini karena keterbatasan data dan waktu, industri milik pemerintah tersebut belum berhasil diungkapkan sebaran geografisnya; *Kedua*, kemungkinan industri dengan fasilitas PMDN dan PMA di masing-masing daerah kabupaten/kota ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan *multiplier effect* yang kecil sehingga tidak memperbesar PDRB daerah bersangkutan (seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN, walaupun nilainya kecil di suatu daerah kabupaten/kota tetapi mempunyai *multiplier effect* yang besar sehingga dapat mempertinggi PDRB daerah bersangkutan; *Ketiga*, penanaman investasi pada daerah kabupaten/kota baik PMDN maupun PMA terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama; dan *keempat*, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik swasta yang bersumber PMDN dan PMA tertanam pada sektor sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

Menurut Suhartiningsih (2003), dengan potensi kelapa sawit yang ada seharusnya Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Selama ini Malaysia merupakan eksportir terbesar di dunia yang pangsa pasarnya mencapai 48,26 %. Untuk itu diperlukan beberapa langkah, antara lain: *pertama*, memperluas areal perkebunan; *kedua*, membangun infrastruktur yang memadai dan harus terkait dengan unit pengolahannya; *ketiga*, mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini kurang terfokus; *keempat*, menemukan teknologi baru untuk diversifikasi produk; dan *kelima*, harus ada deregulasi dalam industri kelapa sawit. Selama ini proses perizinan investasi industri kelapa sawit di Indonesia harus melewati 17 lembaga di pusat dan 25 lembaga di daerah. Sementara di Malaysia, investor cuma bertemu dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB).

Analisis Kesejahteraan Masyarakat Petani Kelapa Sawit

Apabila diamati tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,49 persen. Dari Tabel 3 terlihat pada tahun 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar -1,09 %. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan,

harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Tabel 3 Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

Kelompok Pendapatan	1995		1998		2003	
	w	g	w	G	w	g
20 % terendah	0,081	-0,008	0,151	0,071	0,117	-0,034
20 % terendah kedua	0,127	0,009	0,195	0,068	0,158	-0,036
20 % terendah ketiga	0,144	-0,006	0,215	0,071	0,183	-0,032
20 % terendah keempat	0,196	-0,012	0,201	0,006	0,211	0,010
20 % pendapatan tertinggi	0,454	0,017	0,238	-0,216	0,331	0,093
Indeks Pertumbuhan Kesejahteraan	0,49		-1,09		1,72	

Sumber: Almasdi Syahza, 2004

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 328 persen, sedangkan kelompok 60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar -156 persen.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit baik perusahaan inti maupun plasma membutuhkan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan

perkebunan kelapa sawit itu menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.

Adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal itu berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat, itu merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif dapat diindikasikan oleh peningkatan pendapatan per kapitanya. Salah satu parameter yang paling mudah dilihat secara kuantitatif adalah penyerapan tenaga kerja yang meningkatkan pendapatan dari upah tenaga. Bentuk upah yang dapat diterima oleh tenaga kerja lokal adalah: pemanenan, timbang dan muat, pembersihan lahan, pemberantasan hama. Dalam analisis ini, upah tenaga kerja untuk panen sekitar Rp 35,00 per kg TBS, upah timbang dan muat sekitar Rp 12,00 per kg TBS. Pembersihan lahan Rp 75.000 per ha per catur wulan, pemupukan dan pemberantasan hama. Dengan asumsi rata-rata produksi TBS 3.700 kg per bulan, maka petani akan mengeluarkan upah panen dan timbang sebesar Rp 173.900 per petani per bulan. Diasumsikan di tiga kabupaten (daerah penelitian) jumlah petani sebanyak 107.111 KK dengan produksi rata-rata 3.700 kg TBS, maka total upah panen dan timbang yang beredar di masyarakat sebesar Rp 18.626.602.900 per bulan. Tingginya jumlah uang yang beredar di daerah pengembangan perkebunan ini akan menimbulkan dampak ekonomi lanjutan terhadap sektor pendukungnya. Hal itu akan menyebabkan tumbuhnya ekonomi pedesaan, yang pada akhirnya akan muncul pusat-pusat pertumbuhan di daerah pedesaan (agropolitan).

Kesimpulan

Kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 2,48, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,49 persen. Tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 1,72 persen. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian pedesaan.

Perkebunan yang diusahakan secara swadaya seperti jalan sendiri tanpa bergantung kepada inti. Untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit ke depan dirancang berbentuk kemitraan antara petani dengan perusahaan inti, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan ikut pemilikan modal pada pabrik kelapa sawit (PKS). Konsep ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahatani maupun pabrik pengolahannya, yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani.

Untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis pedesaan, maka harus ada kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi

tersebut. Kebijakan itu antara lain; memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y.Z., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, hal 49-55. Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Cochran, W. G., 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. Jakarta: UI-Press.
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau., 2003, *Laporan Tahunan*. Pekanbaru: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Pemda Propinsi Riau., 2000, *Rencana Strategi Pembangunan Daerah Riau*, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Pekanbaru.
- Saragih, B., 2001. *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE, Bogor.
- Suhartiningsih, W., 2003, Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Usahawan Indonesia* No 02/TH.XXXII Februari 2003, hal 53-55, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Syahza, A., 2002. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, hal 45-51. Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta.
- ., 2003a. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. VIII/01/Juni/2003, hal 33-42, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2003b. Prospek Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, hal 68-77. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ., 2004. Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani di Pedesaan, dalam *Perspektif*, Vol 9 No 2, Desember 2004, hal 95-103. FE Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tambunan, T.T.H., 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro, M. P., 2000. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi ke tujuh. Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, NHS., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia*, NO. 07/TH. XXXI Juli 2002, hal 28-34, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.